



KUPAS SEKILAT, PERBEDAAN KUHAP BARU DENGAN KUHAP LAMA



A Junaedi Karso

KUPAS SEKILAT, PERBEDAAN KUHAP BARU DENGAN KUHAP LAMA

Tentang Penulis



A Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Pendidikan formalnya S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), S2 FH USU Medan (lulus tahun 2020) dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017); Pendidikan Non Formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

KUPAS SEKILAT, PERBEDAAN KUHAP BARU DENGAN KUHAP LAMA

A. Junaedi Karso



PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**KUPAS SEKILAT, PERBEDAAN KUHAP BARU
DENGAN KUHAP LAMA**

Penulis : A. Junaedi Karso

Desain Sampul : Firman Isma'il

Tata Letak : Riska Apriliani

ISBN : 978-634-271-545-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2026**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel: eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama: 2026

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada “Allah SWT” atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang “Kupas Sekilat, Perbedaan KUHAP Baru dengan KUHAP Lama”.

Buku ini terdiri atas empat bab yang membahas tentang Gagasan Diberlakukannya KUHAP Nasional, Tua Rentanya Usia KUHAP Nasional di Indonesia, KUHAP Baru dengan KUHAP Lama, serta KUHAP Baru Memperkuat *Due Proces of Law* Pengadilan Indonesia.

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kutip atau salah menorehkan sumber-sumber buku terkait “Kupas Sekilat, Perbedaan KUHAP Baru dengan KUHAP Lama” *ini*.

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri, tulisan ini kami kutif, lansir dari berbagai sumber baik dari Ahi, buku, Artikel, jurnal, media kompas.id, online, google website dandapala.com, hukumonline.com, katadata.co.id, mahkamahagung.go.id, reformasikuhp.org, dst. serta sumber-sumber lainnya.

Dalam hal ini dengan kami sampaikan banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga “Allah SWT” membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Nasrun Minallah Wa Fathun Qarib

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 GAGASAN DIBERLAKUKANNYA KUHAP NASIONAL	1
A. Gagasan KUHAP Nasioanl.....	1
B. Pembaharuan KUHAP	8
C. Poin-Poin Penting Mengenai Sejarah KUHAP	13
D. Urgensi dan Tujuan Revisi KUHAP.....	16
BAB 2 TUA RENTANYA USIA KUHAP NASIONAL DI INDONESIA.....	24
A. Usia dan Asal Muasal KUHAP Nasional	24
B. Karakteristik Sistem Pembuktian Terbuka dalam KUHAP Baru	36
C. Pembuktian dan Sistem Terbuka dalam KUHAP.....	39
D. Pengakuan Bersalah dan Peranan Jaksa dan Polisi dalam KUHAP Nasional	45
BAB 3 KUHAP BARU DENGAN KUHAP LAMA.....	60
A. KUHAP Baru dengan Lama	60
B. Pengaturan <i>Recidive</i> dalam KUHP Lama dan KUHP Baru	68
C. Sistem Pembuktian dalam KUHAP Baru	74
D. Perbedaan Putusan Bebas dan Putusan Lepas	81
BAB 4 KUHAP BARU MEMPERKUAT <i>DUE PROCES OF LAW</i> PENGADILAN INDONESIA.....	90
A. KUHAP Baru Berlaku di Indonesia.....	90
B. Harmonisasi, Integrasi <i>Reward & Punishment</i> dengan Strategi <i>Kindness</i> Pengakuan Bersalah dalam KUHAP	103
C. Menyiapkan Nalar Hakim Menghadapi KUHAP Baru	119
D. Pendapat Hakim pada RUU KUHAP	127
E. Sistem Pembuktian Terbuka dalam KUHAP Baru..	137
F. Samakan Persepsi Makna Frasa Pemeriksaan Terdakwa dalam KUHAP Baru	143

G. Mengetahui Lebih Dekat dengan Praperadilan dalam RUU KUHP	148
H. Penguatan Penilaian Hakim	162
DAFTAR PUSTAKA.....	170
TENTANG PENULIS.....	174
LAMPIRAN.....	183

**KUPAS SEKILAT, PERBEDAAN
KUHAP BARU DENGAN KUHAP LAMA**

A. Junaedi Karso



BAB 1

GAGASAN DIBERLAKUKANNYA KUHP NASIONAL

A. Gagasan KUHP Nasional

1. Pemberlakuan KUHP Nasional

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) nasional¹ dinilai sebagai momentum penting dalam sejarah hukum Indonesia. Setelah lebih dari satu abad mengandalkan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda, Indonesia kini memiliki sistem hukum pidana yang dirumuskan dan ditetapkan oleh bangsanya sendiri.

Pakar kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah Senin (5/1/2025)², menilai kehadiran KUHP dan KUHP nasional tidak sekadar bersifat teknis, melainkan mencerminkan kedaulatan hukum negara. Menurut dia, pembaruan ini menjadi lompatan historis dalam perjalanan Indonesia sebagai negara hukum.

¹ Karso, A.Junaedi (2026). Selamat Datang Kuhp & Kuhp Baru Selamat Tinggal Warisan Hukum Kolonial Belanda, Penerbit Samudra Biru, Bantul, DI Yogyakarta 55198, h.1-4

² Trubus Rahardiansah, Guru Besar Trisakti: KUHP-KUHP Baru Jadi Tonggak Kedaulatan Hukum Indonesia, <https://katadata.co.id>, diakses pada tanggal 5 Januari 2025, pukul 19.12 WIB

BAB

2

TUA RENTANYA USIA KUHAP NASIONAL DI INDONESIA

A. Usia dan Asal Muasal KUHAP Nasional

1. Tuanya Rentanya Usia KUHAP Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹² lahir tanggal 31 Desember 1981, saat ini sudah memasuki usia 43 tahun¹³. Bilamana dibaratkan usia seorang manusia, maka telah tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa berkat kritik atau nasehat yang mewarnainya.

Pembentukan KUHAP merupakan langkah progresif dalam menciptakan kesatuan hukum acara pidana nasional yang terkodifikasi. Bahkan KUHAP dinilai sebagai karya agung atau produk monumental era pemerintahan Presiden Soeharto.

Hal ini dikarenakan pasca kemerdekaan Indonesia sampai akhir tahun 1981 pelaksanaan proses peradilan pidana masih menggunakan hukum acara warisan Kolonial yakni *Herziene Inlandsche Reglement* atau HIR.

¹² Karso, A.Junaedi (2026). *Selamat Datang Kuhap & Kuhp Baru Selamat Tinggal Warisan Hukum Kolonial Belanda*, Penerbit Samudra Biru, Bantul, DI Yogyakarta 55198, h.41-44

¹³ Adji Prakoso, 43 Tahun Lahirnya KUHAP, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 20.14 WIB

BAB 3

KUHAP BARU DENGAN KUHAP LAMA

A. KUHAP Baru dengan Lama

1. Perbedaan Utama KUHAP Baru dengan KUHAP Lama

Perbedaan utama KUHAP dan KUHAP baru dengan lama terletak pada pergeseran paradigma:

- a. **KUHAP lama**, hanya menitikberatkan pada penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. **KUHAP baru**, memasukkan tindakan lain seperti penyadapan, pemblokiran rekening, serta larangan bepergian ke luar negeri sebagai bagian dari upaya paksa

Perbedaan KUHAP (Proses Pidana)

- a. Fokus: Lama (Interaksi Negara vs Warga Bermasalah) vs Baru (Pemberdayaan Hak Warga Negara & Kelompok Rentan).
- b. Teknologi: Lama (Tidak ada) vs Baru (Sidang daring, bukti elektronik).
- c. Upaya Paksa & Praperadilan: Lama (Terbatas) vs Baru (Diperluas, termasuk penyadapan, pemblokiran).
- d. *Plea Bargaining* (Pengakuan Bersalah): Lama (Tidak ada) vs Baru (Diakui sebagai terobosan, dengan imbalan keringanan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP atau lebih dikenal dengan sebutan “*KUHAP/Nasional atau KUHAP baru*”, membawa sejumlah

BAB 4

KUHAP BARU MEMPERKUAT *DUE PROCES OF LAW* PENGADILAN INDONESIA

A. KUHAP Baru Berlaku di Indonesia

Kapan KUHAP Baru Berlaku terhadap Perkara yang Sudah Dilimpahkan ke Pengadilan?

Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHAP dan mulai berlaku 2 Januari 2026, demikian Pasal 368 dan 369 UU 20 Tahun 2025 (KUHP Baru)³⁰ mengaturnya.

Pertanyaannya, dengan berlakunya KUHAP Baru ini, bagaimana proses penyidikan, penuntutan, persidangan dan upaya hukum yang akan, sedang, telah selesai dilaksanakan, apakah menggunakan KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) ataukah KUHAP Baru ?

Untuk penyidikan dan penuntutan, ketentuannya relatif mudah dibaca. Berdasarkan Pasal 361 huruf a: *“perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan harus diselesaikan berdasarkan KUHAP lama.”*

Sementara itu, Pasal 361 huruf b menyatakan: *“perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya KUHAP Baru tetapi proses penyidikan atau penuntutan belum dimulai, maka penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan KUHAP Baru.”*

³⁰Guse Prayudi, Kapan KUHAP Baru Berlaku terhadap Perkara yang Sudah Dilimpahkan ke Pengadilan, <https://dandapala.com>, 19.48 WIB

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Arifin, B., Arfarizky, R. A., & Windari, R. (2023). *Perbandingan Konsep Recidive dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Criminal Act of South Korea Abstrak*. 45(2).
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2010.
- Barda Nawawi Arief. (2012). *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut* (Cetakan IV). Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Damaska, Mirjan, Evidence Law Adrift, Yale University Press, 1997.
- Eddy O. S. Hiariej, 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso. (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Karso, A.Junaedi. Selamat Datang Kuhap & Kuhp Baru Selamat Tinggal Warisan Hukum Kolonial Belanda, Penerbit Samudra Biru, Bantul, DI Yogyakarta 55198, 2026.
- M. Yahya, Hukum Pembuktian, Bandung: Alumni, 2015.
- Muladi & Arief, Teori-teori Modern dalam Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2010.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Relevansi SEMA 5/2021 terkait Praperadilan dan Pasal 154 ayat (1) huruf d RKUHAP

S. Tanusubroto, 1983, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, cetakan 1, Alumni, Bandung.

Scholhuber, Stephen, *Modern Evidence Analysis*, Chicago Press, 2012.

Wigmore, John Henry, *A Treatise on the Anglo-American System of Evidence*, Boston: Little, Brown and Co, 1940.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Online

Adji Prakoso, 43 Tahun Lahirnya KUHAP, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 20.14 WIB

Azmi Syahputra, Jaksa dalam Pusaran KUHAP Baru: Antara Pengendali Mutu atau Stempel Penyidikan, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Januari 2026, pukul 20.16 WIB

Didik Nursetiawan, Menelisik Perbedaan Pengaturan Recidive dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 21 Januari 2026, pukul 02.36 WIB

Dr. Marsudin Nainggolan, Sistem Pembuktian Terbuka Dalam KUHAP Baru, Era Baru Peradilan Pidana Indonesia, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 10.40 WIB

Dr. Pudjoharsoyo, Menyiapkan Nalar Hakim Menghadapi KUHAP Baru: Dari Petunjuk ke Pengamatan Hakim, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 10.45 WIB

- Guse Prayudi, Kapan KUHAP Baru Berlaku terhadap Perkara yang Sudah Dilimpahkan ke Pengadilan, <https://dandapala.com>, 19.48 WIB
- [https://www.kompas.id/Albert Aries](https://www.kompas.id/Albert_Aries), Menuju Pembaruan KUHAP, diakses pada tanggal 5 Januari 2026, pukul 19.00 WIB
- Karso, A.Junaedi (2026). Selamat Datang Kuhap & Kuhp Baru Selamat Tinggal Warisan Hukum Kolonial Belanda, Penerbit Samudra Biru, Bantul, DI Yogyakarta 55198, h.90-91
- Muhammad Yasin, Asal Muasal KUHAP Adopsi Prinsip Diferensiasi Fungsi, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 20.16 WIB
- Nur Amalia Abbas, Menakar Arah Pembaruan KUHAP, <https://marinews.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 21 Januari 2026, pukul 02.34 WIB
- Pradikta Andi Alvat, Tranformasi Praperadilan dalam KUHAP, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 21 Januari 2026, pukul 19.41 WIB
- Riki Perdana Raya Waruwu, Urgensi Pembaruan KUHAP: Mengapa Kita Membutuhkannya, <https://marinews.mahkamahagung.go.id>, dikases pada tanggal 21 Januari 2026, pukul 23.16 WIB
- Romi Hardika, 12 Perubahan Prosedur Persidangan di KUHAP Baru, Hakim Wajib Tahu, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 21.52 WIB
- Romi Hardika, 12 Perubahan Prosedur Persidangan di KUHAP Baru, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 10.14 WIB
- Romi Hardika-PN Pare-pare, 12 Perubahan Prosedur Persidangan di KUHAP Baru, Hakim Wajib Tahu, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 24.39 WIB

Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP, <https://reformasikuhp.org>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 20.32 WIB

Sunoto SH MH Hakim PN Jakpus, KUHP Baru, Perbedaan Perlakuan Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas dan Putusan Lepas, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 21 Januari 2026, pukul 02.40 WIB

Trubus Rahardiansah, Guru Besar Trisakti: KUHP-KUHAP Baru Jadi Tonggak Kedaulatan Hukum Indonesia, <https://katadata.co.id>, diakses pada tanggal 5 Januari 2025, pukul 19.12 WIB

Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983.

Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

TENTANG PENULIS



A. Junaedi Karso, Adalah seorang akademisi dan advokat yang lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Pendidikan formalnya S1 FIH Universitas Wirladora Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Universitas Pramita Tangerang (lulus tahun 2008), S2 FH Universitas Sumatera Utara Medan (lulus tahun 2020) dan S3 Universitas Satyagama FIP Jakarta (lulus tahun 2017); Pendidikan Non Formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Intermedite Two* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain *My Dreams Future Procurement break Through* di LPKN tahun 2020, *Certificate Prourement Contract Legal Expert (CPCLE)* di International Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, *Certificate Procurement in Perpetice ISO* di Nevi Belanda tahun 2020, *Implementasi System Thinking* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/ Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, *Dinamika Balcklist* dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di

LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *Awareness, Understanding & Implementing Quality Management System* di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, *New Normal* Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “*How to Perform While Transform*” di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui *Quality Assurance* dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020,

Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer* (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research* (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research* (CIQaR) di Quantum HRM International KAN tahun 2021.

Karya yang berupa buku adalah sebagai berikut: Buku Ajar Dasar dasar Ilmu Sosial; Buku Ajar Dasar Dasar Ilmu Politik; Buku Ajar Pemerintah Nasional; Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan Versi Kedua; Buku Ajar Antikorupsi; Buku Ajar Master Pendidikan Kewarganegaraan; Buku Ajar Politik Pertahanan dan Keamanan; Buku Ajar Politik Hukum Indonesia; Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan; Buku Ajar Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; Buku Ajar Good Governance; Buku Aja Etika Politik Pemerintahan; Buku Ajar Ekonomi Politik; Buku Ajar E Government; Buku Ajar Sistem Sosial Politik Indonesia; Buku Ajar Sektor Pelayanan Publik di Indonesia; Buku Ajar Konstitusi dan Kelembagaan; Buku Ajar Kebijakan Sektor Publik; Buku Ajar Manajemen Konflik; Buku Ajar Negosiasi Politik di Indonesia; Buku Ajar Media dan Demokrasi di Indonesia; Buku Ajar Pendidikan Pancasila; Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan; Buku Ajar Hukum Administrasi Negara; Buku Ajar Komunikasi Pemerintahan di Indonesia; Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi bagi Aparatur Desa Indonesia; *Implementation of Good Corporate Governance to Secure Assets n State Owned Palm Oil Plantation Companies and Privately Owned Companies in Indonesia*; Buku Kinerja Kejaksaan Agung Kolaboras Penegak

Hukum dalam Memperbaiki Wajah Pemberantasan Korupsi di Indonesia; E Commerce Datang Warung Tradisional Hilang; Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan Politik di Pulau Jawa Netralitas Apartur Negara pada Pilpres 2024 Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat Dibawah Kepemimpinan Ridwan Kamil; Perang Israel Palestina Peran Serta Indonesia dalam Mewujudkan Kemerdekaan Palestina Kontribusi Bantuan Kemanusiaan Muhammadiyah Aksi Bela Palestina Public Figure Internasional and Nasional; Pembangunan Proyek Food Estate Pemenuhan Kebutuhan Pangan Indonesia Antara Untung and Rugi; Menanti Dasyatnya Bunyi Ketukan Palu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU XXI 2023 Soal Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024; Penerapan Good Corporate Governance Untuk Pengamanan Aset Pada Perusahaan Kebun Sawit di Perusahaan Milik Negara Bumn Perusahaan Swasta di Indonesia; Pengakuan Negara terhadap Kedudukan Hukum Adat dalam UUD 1945; Sekilas Info Indonesia Berduka Akibat Ulah Firli Bahur Panglima Perang KPK di Indonesia Sengkarut di Pusaran Internal Dijerat Pasal Dugaan Pemerasan terhadap Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo; Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode; Kupas Tuntas Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat terkait Penundaan Pemilu 2024 Meraung Penundaan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tetap Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia; Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia yang Tangguh; Seputar Lintas Kejahatan Realita Antara and Kamufalse Pidana Berdasarkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; Polri di bawah Kementerian dalam Negeri antara Politik atau Pelemahan Institusi; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 40; Peranan dan Upaya Badan Narkotika Nasional BNN dalam Pemberantasan Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Peran Fungsi Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan penegakan hukum dan kolaborasi pemberantasan

Korupsi di Indonesia; Risk Manajemen Good Corporate Governance Pengamanan terhadap pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014; Peranan dan Upaya Badan Narkotika Nasional BNN dalam Pemberantasan Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Peran Fungsi Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan penegakan hukum dan kolaborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Pengaruh Kepemimpinan Profesionalisme dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi Manajemen Pemerintahan Terhadap Kinerja Peran dan Fungsi Camat di Indonesia; Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga di Dalam Pembangunan Perekonomian Sosial Budaya di Kabupaten Indramayu; Pengantar Tata Hukum Pemerintahan and Dasar dasar Tata Negara di Indonesia; Penerapan Good Corporate Governanance GCG Untuk Pengamanan Aset Perusahaan; Pembangunan transportasi tol laut dalam mewujudkan Indonesia yang makmur menuju poros maritim dunia; Perkawinan campuran dan Kesejahteraan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat; Membangun kualitas pelayanan administrasi pertanahan studi pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Anjatan Indramayu; Lintasan Pandangan Mata yang Remang-Remang Tentang Dilema Indonesia Lumbung Sawit Dunia; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara di Kecamatan Anjatan Indramayu; Ketegasan Polri and Penegakan Hukum dalam Membuka Tabir Hitam Kekejaman Ferdys Sambo; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi and Ekonomi Masyarakat; Implementasi Analisis Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia; Implementasi KSOP sebagai Kepala Pemerintahan di Laut; Hukuman Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial untuk Rakyat Miskin Dimasa Covid 19; Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut; Dasyatnya Money Politik Pilkades Pilwu di Indramayu; inggris pusat aktivitas judi online terbesar di dunia versus Indonesia terpapar; penerapan e government eoffice sistem perencanaan pembangunan di daerah; Sumbangsih Smart E Government

Artificial Intelligence di Indonesia; RUU TNI Anak Kandung Rakyat Rakhmat Bagi Indonesia Solus Populis Suprema Lex Esto; RUU Polri Rakhmat Bagi Indonesia Solus Populis Suprema Lex Esto; Revisi Undang Undang Tni Polri Vs Penempatan Jabatan Sipil Di Indonesia; Sekilas Pandangan Lahirnya Palmco Sebagai Produsen Terbesar Kelapa Sawit Dunia; Menyongsong Kota Metropolitan: Teori dan Praktik Pengembangan Kawasan dan Pertumbuhan Ekonomi; Tendensi Politik Regional 2024: Money Politics, Police Power Politics, and Local Democracy; Revisi Undang-Undang TNI Polri VS Penempatan Jabatan Sipil di Indonesia; Sekilas Pandangan Lahirnya PalmCo sebagai Produsen Terbesar Kelapa Sawit Dunia; Kupas Tuntas Parliamentary & Presidential Threshold di Indonesia: Antara Perspektif Positif & Negatif; Dampak Presidential Threshold, Problematika & Solusinya dalam Pemilu; di Indonesia; Pensertifikatan Tanah di Indonesia di antara Kendala dan Problematika: Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Ambang Batas Parlemen dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019-2024 versus Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024; Presidential Threshold di Indonesia: Antara Positif, Negatif & Solutif; Parliamentary Threshold di Indonesia antara Positif & Negatif; Pemagaran Laut Tangerang, Kedaulatan Negara Versus Potensi Laut & Sejarah Maritim Indonesia; Tragedi & Dampak Kerugian Kebakaran di Los Angeles Amerika Serikat; Bulan Ramadhan antara Libur Sekolah & Sejarahnya di Indonesia; Ketokan Palu MK Mengubah Jalan Presidential Threshold di Indonesia; Program Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto Menuju Indonesia Emas 2045; Presiden Prabowo Jabatan & Kekuasaan Milik Rakyat Berantas Korupsi Hingga ke Akar-Akarnya; Kewenangan Kejaksaan Superbody, Membunuh Kewenangan Polri-KPK; Program Pendidikan Deep Learning, Penerapan Artificial Intelligence di Indonesia; Sekilas Program Astacita Prabowo di Sektor Pertanian; Gebrakan Sang Jenderal Genius Prabowo di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Pertahanan; Danantara-

Indonesia Ku Siap Bergerak Menuju Kesejahteraan & Keadilan Ekonomi Rakyat Indonesia; Berkolaborasi dalam Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Astacita; Menyongsong Kota Metropolitan, Teori dan Praktik Pengembangan Kawasan dan Pertumbuhan Ekonomi; Nilai Strategis Indramayu di Antara Pengembangan Kawasan Rebana; Diamputasinya Kewenangan Polri Dalam Penyidikan, Ditangan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis; Kenaikan Pajak PPN 12% Dampak & Kemakmuran, Keadilan Rakyat Indonesia; Manfaat Asuransi Syariah & Perkembangannya di Indonesia; Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto Menuju Indonesia Emas 2045; Investasi Emas dalam Islam & Prediksi Jayanya Emas di Tahun 2025; Kemilau Harga Emas Terkini di Indonesia & Dunia; Ketukan Palu Hakim antara Keadilan & Godaan Kebutuhan Hidup; *Manfaat Asuransi Syariah & Perkembangannya di Indonesia*; Membedah Perjuangan Kartini-Kartini Muslim Indonesia, Dunia, dan Peranannya; Pemagaran Laut Tangerang, Kedaulatan Negara Versus Potensi Laut & Sejarah Maritim Indonesia; Peralihan Hak Guna Usaha, Hak Adat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Pinjaman Online; Lintah Darat Modern di Era Artificial Intelligence; Sekilas Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet Perbankan dan Dampaknya bagi Perekonomian di Indonesia (Editor); Seni & Sejarah Mudik Lebaran di Indonesia; Sentuhan Lembut Prabowo Subianto Meluluhkan Dasyatnya Palu Godam Tarif Donald Trump; UU TNI Rahmat & Barokah bagi NKRI; Gebrakan sang Jendral Genius Prabowo Disektor Pendidikan, Kesehatan dan Pertahanan; Program Pendidikan *Deep Learning*, Penerapan *Artificial Intelligence* di Indonesia; Penyelesaian Sengketa secara Mediasi terhadap Kredit Macet melalui Proses Eksekusi; Hak; Tanggungan atas Tanah dalam Sistem Peradilan Perdata. (Editor); Peralihan Hak Guna Usaha, Hak Adat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (Editor); Sekolah Rakyat Gratis, Program Astacita Sang General Prabowo Menuju Indonesia Emas 2045; Dampak Perang Tarif As-Tiongkok Terhadap Indonesia, Jurus Nan Sakti-

Solutif Sang General Genius Prabowo dalam Menghadapi Tarif Trump”; Keputusan MK Nomor 3/PUU-XXIII/2025, Implementasi Astacita cita Presien Prabowo; Keputusan Mk Nomor: 3/PUU-XXIII/2025 Tentang SD-SMP Negeri Dan Swasta Gratis Sesuai Dengan Astacita Prabowo; Astacita Presiden Prabowo Meningkatkan SDM Solusi Untuk Menghadapi Tingginya Biaya Kuliah Diperguruan Tinggi Menuju Indonesia Emas 2045; TNI Anak Kandung Rakyat, Menjaga Keamanan Kejaksaan Solus Populus Supreme Lex Asto & Astacita Prabowo; Outsourcing Dalam Perspektif Pancasila, & Uu Cipta Kerja, Solusi Terbaik Jangan Dibubarkan Demi Anak Bangsa; WASPADA Pidana TIPIKOR bagi Penyalahgunaan Penggunaan Dana BOS di Lingkungan Sekolah; Pemblokiran Rekening Dorman oleh PPAK: Jurus Antisipasi Memotong Rantai Mengakarnya Judol di Indonesia; Pengeluaran Subsidi BBM dan Listrik Melambung, Membenani APBN Indonesia Versus Pengembangan Energi Terbarukan; Pengeluaran Subsidi BBM dan Listrik Melambung, Membenani Apbn Indonesia Versus Pengembangan Energi Terbarukan; Himpitan Ekonomi Dimasa Pandemi, Penyebab Meningkatnya Pekerja Anak sebagai Permasalahan Global Berdampak pada Lost Learning Pendidikan Mengancam Indonesia Emas 2045; Konservasi Proyek Energi Terbarukan Panas Bumi yang Belum Tergarap Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia; Perang Thailand- Kamboja, Perananan Asean dan Indonesia Versus Menjamurnya Surga Judi dan Ancaman Tarif Trump kepada Thailand-Kamboja; Polemik Keputusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Daerah dan Nasional Versus RUU MK; Buku_Amnesti Hasto, Abolisi Tom Lembong Hak Prerogatif Presiden Sudah Sesuai Kontitusi & Sejarahhnya di Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tonggak Awal Penegakan Hukum di Indonesia; Tanah Nganggur Dua Tahun Diambil Negara Bertentangan dengan Konstitusi vs Konglomerat Pemilik Lahan Terbesar.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

LAMPIRAN



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mencerminkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan perkembangan hukum internasional;
- c. bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan teknologi informasi;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan hukum dalam masyarakat, dan kemajuan teknologi informasi, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

3. Penyidik . . .